



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,

Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826

Faksimilie (021) 5203117



5 November 2020

Nomor : KL.03.01/III/1028/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Peserta Seruan Nasional dalam Akselerasi  
Penanganan Limbah Medis

Yth.  
(Daftar Terlampir)

Dalam upaya percepatan pengamanan limbah medis dan limbah medis COVID-19 perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka percepatan penanganan limbah medis di setiap daerah, akan diselenggarakan "**Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis oleh Para Menteri dan Pimpinan Lembaga beserta Kepala Daerah**". Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari kesehatan nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 November. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir secara virtual pada acara tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 13 November 2020  
Waktu : 08.00-11.30 WIB (jadwal terlampir)

Untuk konfirmasi kehadiran, *link acara* dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ivelty (089507981095) dan Yodi Mulyadi (081319296012). Acara juga dapat disaksikan melalui *livestreaming* melalui kanal *Youtube* Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Kesehatan Lingkungan. *Link* dapat diakses di <http://tiny.cc/LimbahMedis>

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal  
Kesehatan Masyarakat,

dr. Kirana Pritasari, M.QIH  
NIP.196404081990032001

Lampiran Surat  
Nomor : KL.03.01/III/1028/2020  
Tanggal : 5 November

## **DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG**

### **Peserta Daerah**

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Bupati/ Walikota seluruh Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia
4. Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia
9. Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
11. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
16. Kepala Kepolisian Sektor seluruh Indonesia
17. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
18. Ketua Asosiasi Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
19. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
20. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
21. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
22. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
23. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
24. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota

25. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
26. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
27. Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
28. Ketua Ikatan Analis Kesehatan Indonesia seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
29. Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
30. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
31. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
32. Ketua Perhimpunan Sarjana Dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
33. Ketua Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
34. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
35. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
36. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi seluruh Indonesia
37. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
38. Para Direktur Rumah Sakit TNI seluruh Indonesia
39. Para Direktur Rumah Sakit POLRI seluruh Indonesia
40. Para Direktur Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia
41. Direktur RSPI Prof. Sulianti Soeroso Jakarta
42. Direktur RSUP H. Adam Malik Medan
43. Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
44. Direktur RSUP Dr. Soetomo Surabaya
45. Direktur RS Universitas Udayana Bali
46. Direktur RSUP Dr. Kariadi Semarang
47. Direktur RSUD Ambarawa Semarang
48. Direktur RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
49. Direktur RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
50. Direktur RSUD Dr. Moewardi Solo
51. Direktur RSUP Persahabatan Jakarta.
52. Direktur RSUP Prof. Dr. Kandou Manado
53. Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
54. Direktur RSJ Prof. Soerojo Magelang

55. Direktur RSUP Dr. M. Djamil Padang
56. Direktur RS Univ. Airlangga Surabaya
57. Direktur RSUD Arifin Achmad Pekanbaru
58. Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukit Tinggi
59. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
60. Direktur RS YARSI Jakarta
61. Direktur RSPAU Dr. Esnawan Antariksa Jakarta
62. Direktur RSUP Sanglah Bali
63. Direktur RS Antam Medika Pulogadung, Jakarta Timur
64. Direktur RS Bukit Asam Medika Tanjung Enim, Sumatera Selatan
65. Direktur RS Prima Husada Cipta Medan, Sumatera Utara
66. Direktur RS Pelabuhan Cirebon, RS Pelabuhan Palembang
67. Direktur RS Port Medical Center Jakarta Utara
68. Direktur RS PHC Surabaya, Jawa Timur
69. Direktur RS Pelni Jakarta Barat
70. Direktur RS Pertamina Pusat Jakarta Selatan
71. Direktur RS Pertamina Jaya Jakarta Pusat
72. Direktur RS Pertamina Balikpapan
73. Direktur RS Pertamina Cirebon
74. Direktur RS Pertamina Prabumulih
75. Direktur RS Pertamina Tanjung Kalimantan Selatan
76. Direktur RS Pertamedika Tarakan
77. Direktur RS Pertamina Sorong
78. Direktur RS Pertamina Pangkalan Brandan
79. Direktur RS Pertamina Plaju
80. Direktur RS Pertamina Rantau Aceh
81. Direktur RS Bintang Amin Lampung
82. Direktur RS Pertamedika Ummi Rosnati Aceh
83. Direktur RS Baiturrahim Jambi
84. Direktur RS Pertamina Balongan
85. Direktur RS Pertamina Cilacap
86. Direktur RS Pertamina Dumai
87. Direktur RS Petrokimia Gresik
88. Direktur RS Cut Meutia Aceh
89. Direktur RS Bangkatan Tanjung Selamat, Tembakau Deli

90. Direktur RS Sri Pamela Medika Medan, Sumatera Utara
91. Direktur RS Prima Medika Nusantara Medan, Sumatera Utara
92. Direktur RS Nusalima Medika Pekanbaru, Riau
93. Direktur RS Agro Medika Nusantara Bandung, Jawa Barat
94. Direktur RS Nusantara Medika Utama Jember, Jawa Timur
95. Direktur RS Nusantara Sebelas Medika Surabaya, Jawa Timur
96. Direktur RS Rolas Medika Nusantara Surabaya, Jawa Timur
97. Direktur RS Kalimantan Medika Nusantara Pontianak, Kalimantan Barat
98. Direktur RS Pupuk Kaltim Bontang
99. Direktur RS Medika Utama Permata Balikpapan
100. Direktur RSPKT Prima Sangatta Kutai Timur
101. Direktur RS Pupuk Kujang Cikampek
102. Direktur RS Pusri Palembang
103. Direktur RS Sri Bhakti
104. Direktur RS Semen Gresik, Jawa Timur
105. Direktur RS Bakti Timah Pangkalpinang
106. Direktur RS Medika Stannia Bangka Belitung
107. Direktur RSBT Muntok Kabupaten Bangka Barat
108. Direktur RSBT Kabupaten Karimun Kepulauan Riau
109. Direktur Poltekkes Kemenkes NAD, Aceh
110. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, Sumatera Utara
111. Direktur Poltekkes Kemenkes Riau
112. Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, Sumatera Barat
113. Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi
114. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu
115. Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Sumatera Selatan
116. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I, DKI Jakarta
117. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II, DKI Jakarta
118. Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung, Jawa Barat
119. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Jawa Barat
120. Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Jawa Tengah
121. Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
122. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jawa Timur
123. Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Jawa Timur
124. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Bali

125. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, NTB
126. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, NTT
127. Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Kalimantan Barat
128. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kalimantan Selatan
129. Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Kalimantan Tengah
130. Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
131. Direktur Poltekkes Kemenkes Manado, Sulawesi Utara
132. Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Sulawesi Tengah
133. Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, Sulawesi Selatan
134. Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari, Sulawesi Tenggara
135. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku
136. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Maluku Utara
137. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Papua
138. Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo
139. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
140. Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
141. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
142. Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, Sulawesi Barat
143. Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong, Papua Barat
144. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Lampung
145. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar
146. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, Jurusan Kesehatan Masyarakat
147. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, Jurusan Kesehatan Masyarakat
148. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, Jurusan Kesehatan Masyarakat
149. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Manado
150. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
151. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto
152. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

- Andalas, Padang
153. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, Kupang
  154. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar
  155. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
  156. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UPN Veteran, Jakarta
  157. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih, Jayapura
  158. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang
  159. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
  160. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo, Kendari
  161. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jember
  162. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Palu
  163. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Samarinda
  164. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, Semarang
  165. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin, Makassar
  166. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan
  167. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta
  168. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati, Bandar Lampung
  169. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan

170. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah, Pontianak
171. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia
172. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
173. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro
174. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang
175. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta
176. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh
177. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu
178. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Makassar
179. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
180. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta
181. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara
182. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
183. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Respati, Yogyakarta
184. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah, Surakarta
185. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia, Medan
186. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pare-Pare



187. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah, Padang
188. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, Jakarta
189. Kepala Departemen / Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali
190. Para Kepala Puskesmas Seluruh Indonesia
191. Para Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Seluruh Indonesia
192. Para Kepala Laboratorium Rujukan Covid-19 seluruh Indonesia
193. Para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
194. Kepala BBTCL PP Jakarta
195. Kepala BBTCL PP Surabaya
196. Kepala BBTCL PP Yogyakarta
197. Kepala BBTCL PP Banjarbaru
198. Kepala BTKLP PP Kelas I Palembang
199. Kepala BTKLP PP Kelas I Makassar
200. Kepala BTKLP PP Kelas I Batam
201. Kepala BTKLP PP Kelas I Medan
202. Kepala BTKLP PP Kelas I Manado
203. Kepala BTKLP PP Kelas II Ambon

## **Peserta Pusat**

1. Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK
2. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Maritim dan Investasi
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
4. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat, Bappenas
6. Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas
7. Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan
8. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan
9. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK
10. Direktur Verifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, KLHK
11. Sesditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes
12. Sesditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
13. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
14. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes
16. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kemenkes
17. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
18. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes
19. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenkes
20. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes
21. Kepala Biro Umum, Kemenkes
22. Kepala Biro Kepegawaian, Kemenkes
23. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) pusat dan daerah
24. Ketua Asosiasi Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia pusat dan daerah
25. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah pusat dan daerah Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pusat dan daerah
26. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) pusat dan daerah
27. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) pusat dan daerah
28. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pusat dan daerah
29. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) pusat dan daerah
30. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat dan daerah
31. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pusat dan daerah
32. Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) pusat dan daerah

33. Ketua Ikatan Analis Kesehatan Indonesia pusat dan daerah Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) pusat dan daerah
34. Ketua Perhimpunan Sarjana Dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) pusat dan daerah
35. Ketua Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota
36. Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) pusat dan daerah
37. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pusat dan daerah
38. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) pusat dan daerah
39. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
40. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
41. World Health Organization (WHO)
42. United Nations Development Programme (UNDP)



KERANGKA ACUAN  
SERUAN NASIONAL DALAM AKSELERASI PENANGANAN LIMBAH MEDIS  
JAKARTA, 13 NOVEMBER 2020

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Limbah medis yang dihasilkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) termasuk dalam katagori limbah B3. Pengelolaan Limbah Medis fasyankes secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P56 tahun 2015 yang mengatur mengenai Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan data Direktorat Penilaian Kinerja Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per Juni 2020, Jasa Pengolah Limbah B3 Medis berizin sebanyak 16 perusahaan dengan lokasi di Pulau Jawa sebanyak 12 jasa pengolah, 1 di Provinsi Riau, 2 di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain fasyankes yang sudah mendapatkan ijin operasional penggunaan *incinerator* dan *autoclave* baru ada 116 fasyankes. Sebaran yang tidak merata menyebabkan terjadinya penumpukan limbah medis fasyankes dan tingginya biaya yang harus dibayar oleh fasyankes untuk mengolah limbah medis

Pengelolaan limbah medis diharapkan dapat diselesaikan di setiap daerah sesuai dengan prinsip kedekatan, yakni semakin dekat pengolahan limbah dari sumbernya semakin kecil risiko yang dapat ditimbulkan dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Dalam penerapan pengelolaan limbah medis fasyankes terpadu di daerah diperlukan strategi yang melibatkan peran serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Menteri Kesehatan telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2020.

Terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan limbah medis, telah diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur di seluruh Indonesia tentang Prioritas Pengelolaan limbah medis/B3 pada

masa pandemi Wabah Covid-19. Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pengelolaan limbah medis fasyankes memerlukan sinergi dan harmonisasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perhubungan. Demikian juga di daerah harus dilakukan sinergi dan kolaborasi antar dinas terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam upaya implementasi pengelolaan limbah medis fasyankes di daerah tentu peran aktif Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mempercepat dan mendorong setiap satuan kerja terkait dan pemangku kepentingan. Oleh karenanya Kementerian Kesehatan perlu segera melakukan seruan nasional akselerasi penanganan limbah medis untuk membangun komitmen dan mendorong pemerintah daerah menerapkan konsep pengelolaan limbah medis melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2020.

## II. TUJUAN

### a. Umum

Terwujudnya pengelolaan limbah medis di setiap daerah secara terpadu

### b. Khusus

1. Diperolehnya komitmen dari pengambil kebijakan di pusat dan daerah dalam penanganan limbah medis di setiap daerah.
2. Tersosialisasinya PMK nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah
3. Tersosialisasinya SE (Surat Edaran) Kementerian Dalam Negeri tentang prioritas pengelolaan limbah medis di daerah dan pembentukan unit kelembagaan
4. Diperolehnya Rencana Tindak Lanjut dalam implementasi pengelolaan limbah medis di setiap daerah secara terpadu

## III. SASARAN

Peserta Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis di setiap daerah oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian terkait lainnya dengan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 :

1. Pejabat kementerian terkait dan pejabat pemerintah daerah
2. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
3. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
4. Akademisi dan perguruan tinggi
5. Organisasi profesi
6. Asosiasi/mitra pembangunan
7. Asosiasi/perkumpulan Rumah Sakit/Fasyankes
8. Jumalis (Media Center) mitra dari setiap kementerian

#### IV. WAKTU DAN TEMPAT

Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis di setiap daerah oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian terkait lainnya dengan Kepala Daerah :

- Bertempat di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4 - 9, Kuningan, Jakarta Selatan dengan panggung terbatas dan disiarkan melalui *Zoom Link* dan *Live Streaming Youtube*
- Hari Jum'at, 13 November 2020
- Pukul 08.30 – 11.30 WIB

#### V. METODE PELAKSANAAN

Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian terkait lainnya dengan Kepala Daerah dilaksanakan dengan beberapa metode penyampaian :

1. Penyamaan pandangan peserta tentang "kondisi dan tantangan pengelolaan limbah medis di Indonesia" melalui penayangan video
2. "Seruan Aksi Nasional: Komitmen dan seruan dalam penanganan limbah medis secara nasional dan penanganannya di daerah" oleh Menteri Kesehatan melalui kompilasi (tapping video) bersama :
  - a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
  - b. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi,
  - c. Menteri Dalam Negeri,
  - d. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS,
  - e. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
  - f. Menteri Perhubungan,
  - g. Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan COVID 19
  - h. Kepala POLRI
3. Penyampaian materi singkat penanganan limbah COVID 19 melalui video

4. Penyampaian arahan akselerasi penanganan limbah medis secara virtual dari :
  - a. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan,
  - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
  - c. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - d. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Penyampaian Komitmen Kepala daerah untuk akselerasi penanganan limbah medis di daerah melalui *tapping video* :
  - a. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
  - b. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - c. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
  - d. Walikota Surabaya, Jawa Timur
  - e. Walikota Payakumbuh, Sumatera Barat
6. Talkshow "Kebijakan dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Indonesia dipandu oleh Sekjen PERSI dengan narasumber :
  - a. Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes
  - b. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri
  - c. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Ditjen PSLB3, KLHK
  - d. Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub
  - e. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
  - f. Kepala Divisi Hubungan International, Mabes POLRI

#### VI. BIAYA

Biaya yang diperlukan dalam rangka Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis oleh Kementerian beserta Kepala Daerah dilaksanakan bersumber kepada DIPA Satker Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2020.

Penanggung jawab kegiatan

Kepala Subdit Pengamanan Limbah  
dari Radiasi,



Jeisi N. Marampa, SKM, MKKK  
NIP. 196812261994012002

**JADWAL**  
Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan Limbah Medis  
Jakarta, 13 November 2020

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
08.00 – 08.30	Persiapan peserta	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan	MC
	Video "kondisi dan tantangan pengelolaan limbah medis di Indonesia"	Panitia
	kompilasi (tapping video) Para Menteri "Seruan Aksi Nasional: Komitmen dan seruan dalam penanganan limbah medis secara nasional dan penanganannya di daerah"	1. Menteri Kesehatan 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, 4. Menteri Dalam Negeri, 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 7. Menteri Perhubungan, 8. Kepala BNPB/Ketua Satgas COVID19 9. Kepala POLRI
	Video penanganan limbah COVID 19	Panitia
09.00 – 09.20	Sambutan dan arahan akselerasi penanganan limbah medis di Indonesia	1. Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes 2. Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri 3. Dirjen Pengelolaan Sampah dan limbah B3, KLHK 4. Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
09.20 – 09.30	Komitmen Kepala Daerah : Akselerasi penanganan limbah medis di daerah (kompilasi video para Gubernur dan Walikota)	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 4. Walikota Surabaya, Jawa Timur 5. Walikota Payakumbuh, Sumatera Barat
09.30 - 11.15	Talkshow "Kebijakan dan Tantangan Pengelolaan Limbah medis di Indonesia"	1. Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas, Kemenkes 2. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri 3. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Ditjen PSLB3, KLHK 4. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes, Kemenkes 5. Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat, Kemenhub 6. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes POLRI  Moderator : Sekjen PERSI
11.15 – 11.30	Penutupan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan	Penutupan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan